

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjelang peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-61 tahun 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan Pidato Tahunan di hadapan Sidang Tahunan (ST) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 16 Agustus 2006 dan pada tanggal 23 Agustus 2006 dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung MPR/DPR Senayan Jakarta.

Pidato Tahunan Presiden merupakan peristiwa rutin kenegaraan yang dilakukan oleh Presiden dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus untuk menyampaikan hasil kinerja Pemerintah selama satu tahun kebelakang serta menyampaikan Program kerja dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) beserta nota keuangannya satu tahun kedepan.

Sejak tanggal 7 (tujuh) sampai dengan tanggal 18 (delapan belas) Agustus tahun 2000, Indonesia mulai memasuki babak baru dalam sistem ketatanegaraannya, yakni Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (ST MPR). Sebelumnya MPR hanya mengenal Sidang Umum (SU) dan Sidang Istimewa (SI) sebagai tuntutan dari reformasi atas kontrol MPR/DPR terhadap kinerja Presiden serta kabinetnya.

Sejatinya, Presiden dapat dikontrol tiap tahun dengan cara melaporkan hasil kerja dan kinerjanya selama periode itu. Hal inilah yang kemudian ditindak lanjuti oleh "Tim Tujuh Departemen Dalam Negeri" pimpinan Prof. Ryaas Rasyid. Untuk menyiapkan tiga rancangan undang-undang (RUU) krusial, yakni RUU Pemilu, RUU Partai Politik, dan RUU Susunan dan Kedudukan MPR/DPR/DPD.¹

Pidato Tahunan yang akan disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditanggapi beragam oleh khalayak luas, diantaranya termasuk media massa online, seperti Kompas Cyber Media (KCM) dan Media Indonesia Online (MI Online). Hal ini berangkat dari isu yang berhembus di Senayan Jakarta bahwa akan ada "hujan interupsi" yang akan dilakukan oleh fraksi-fraksi di Senayan mengiringi Pidato Tahunan Presiden tahun 2006. Bahkan pihak Istana Kepresidenan melalui Juru Bicara Kepresidenan mengaku yakin Pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Agustus tidak akan diinterupsi anggota DPR. "*Tidak ada interupsi sama sekali dalam pidato kenegaraan,*" ujar Andi Malarangeng di Istana Negara, Jakarta, Selasa (15/8) menanggapi wacana adanya "hujan interupsi" yang akan dilakukan oleh sejumlah anggota dewan yang berniat menginterupsi pidato kenegaraan Presiden Yudhoyono pada pembukaan masa sidang DPR 16 Agustus 2006.²

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan ketua umumnya Megawati Soekarno Putri merupakan salah satu mayoritas pemilik kursi di Senayan sekaligus sebagai partai yang terang-terangan menyatakan dirinya sebagai partai oposisi pada Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,

¹ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0008/01/rasional/menc07.htm> 02:15-19 Agustus 2006 WIB

² [Http://www.media-indonesia.com](http://www.media-indonesia.com) dalam rubrik POLKAM Selasa, 15 Agustus 2006-18:35 WIB

disinggung sebagai motor penggerak fraksi-fraksi di DPR/MPR untuk melakukan interupsi.

Hal ini menarik perhatian Presiden serta partai politik dan pihak-pihak yang pro pemerintah. Mengingat Sidang tahunan DPR/MPR dapat menghasilkan rekomendasi ke Sidang Istimewa (SI), hal ini tentu tidak diinginkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Citra positif yang selalu dibangun oleh Presiden tentu akan sedikit ternoda jika ada interupsi ditengah pembacaan pidato. Kekhawatiran ini tentu sangat beralasan mengingat hal yang sama pernah menimpa mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang digulingkan dalam Sidang tahunan DPR/MPR tahun 2001 yang kemudian merekomendasikan Sidang Istimewa tahun 2001 sehingga Presiden Abdurrahman Wahid terguling dari kursi Kepresidenan.

Peristiwa tersebut berawal ketika Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja (PAH II BP) MPR yang berupaya mempertajam Pasal 49 Ayat (2) Tatib MPR itu-dengan melengkapi kata "mendengarkan" menjadi "mendengarkan dan membahas" yang mendapat sorotan tajam. Tudingan terarah kepada fraksi-fraksi besar di PAH II BP MPR yang berupaya membuat manuver politik demi kepentingan sesaat. Ketua PAH II BP MPR Rambe Kamarulzaman yang kebetulan dari Fraksi Partai Golkar, menjadi bulan-bulanan ketika pers mencium adanya upaya Sidang Tahunan bisa merekomendasi Sidang Istimewa MPR.

Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Perubahan tersebut terjadi karena perubahan pasal 50 yang dijelaskan dibawah ini dibawah ini ;³

Perubahan itu melingkupi perubahan pasal-pasal berikutnya yang meliputi : Pasal 50 Ayat (2) Tatib MPR mengatakan, "*Sidang Tahunan Majelis adalah Sidang yang diadakan setiap tahun*". Lalu PAH II BP MPR dalam Rantap Perubahan Kedua Tap MPR No II/ MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR mempertegas Sidang Tahunan menjadi tiga huruf yakni, (a) "Sidang yang diselenggarakan setiap tahun sekali di antara dua masa Sidang Umum Majelis pada masa jabatan keanggotaan Majelis yang bersangkutan"; (b) "Sidang yang diselenggarakan untuk mendengarkan dan membahas laporan Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya atas pelaksanaan putusan Majelis"; (c) Sidang yang dapat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Putusan Majelis lainnya".

Dari perubahan pasal ini ternyata mengandung makna lain. Apa makna huruf (a) dari penjelasan soal Sidang Tahunan itu? Sidang Tahunan (ST) MPR dilaksanakan tiga kali di antara dua Sidang Umum MPR. Misalnya, antara Sidang Umum MPR 1999 dengan Sidang Umum MPR 2003 dilaksanakan ST MPR 2000, 2001, dan 2002. Makna Huruf (b), apabila pasal krusial ini tidak diubah dari "**mendengarkan**" menjadi "**mendengarkan dan membahas**", ST MPR 2000 kali ini tidak berhak menilai laporan tahunan Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya. Lalu apa arti huruf (c) dari pengertian ST MPR?⁴

Sangat jelas, bahwa terdapat pergeseran makna dan tindakan yang radikal.

Kalau di RUU Susduk hanya disebutkan bahwa "Sidang Umum untuk mendengarkan, membahas, dan menanggapi Laporan Tahunan Presiden", kini fungsi dan kedudukannya diperluas menjadi dapat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Putusan Majelis. Apabila pasal Tatib MPR itu lolos dalam ST MPR 2000, konsekuensinya adalah, konstitusi (UUD 1945 dan Perubahannya) bisa diamandemen atau diubah setiap tahun serta Ketetapan MPR bisa dicabut atau dibuat setiap tahun pula.

³ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0008/01/rasional/menc07.htm> 2 Agustus 2000-14:30 WIB

⁴ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0008/02/rasional/menc07.htm> 19 Agustus 2006-15:13 WIB

Krisis hubungan antara Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono dimulai ketika beredar isu ketidakpatuhan Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinasi Pertahanan dan Keamanan (MENKOPOLKAM) dalam penyelesaian masalah Aceh, yang kemudian Susilo Bambang Yudhoyono melayangkan Surat pengunduran diri sebagai Menteri POLKAM dan diterima oleh Megawati. Krisis ini memuncak lagi ketika Susilo Bambang Yudhoyono mencalonkan diri bersama Yusuf Kalla menjadi Presiden dan Wakil presiden Indonesia dalam Pemilihan Umum (PEMILU) tahun 2004 bersaing bersama Megawati Soekarno Putri.

Hubungan antara Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono yang terus memuncak tentu berakibat pada kestabilan politik dan ekonomi. Bahkan dalam suatu kesempatan Kepala Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti, yang ditemui di Kantor LIPI, mengharapkan acara pelantikan Presiden Yudhoyono di MPR tanggal 20 Oktober 2004 itu dapat menjadi momentum untuk menyelesaikan persoalan pribadi antara Megawati Sukarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Ikrar Nusa Bhakti tidak sependapat digunakan istilah rekonsiliasi untuk mempertemukan Megawati dan Yudhoyono karena yang terjadi adalah lebih persoalan individual di antara mereka. *"Demi masa depan bangsa, sebetulnya Megawati jangan mengecilkan arti kenegarawanan dia yang selama ini tertanam di hati masyarakat dengan tidak menghadiri acara tanggal 20 Oktober tersebut,"* katanya. Menurut Ikrar, sikap kenegarawanan Megawati itu, misalnya, tidak memanfaatkan jabatannya sebagai seorang presiden yang berkuasa untuk

memenangi pemilu. *"Megawati juga telah membawa negeri ini ke arah pergantian pemerintahan yang mulus. Nilai yang agung semacam itu jangan sampai dinodai oleh nila setitik yang akan merusak segala hasil yang sudah dicapai Megawati,"* katanya. Ikrar mengemukakan, kalau Megawati mau datang pada 20 Oktober 2004, kenegarawanannya justru akan semakin menonjol. *"Apalagi kalau Megawati mau menyalami Yudhoyono dan mau memberikan sepatah dua patah kata,"* ujarnya.⁵

Apa yang disampaikan oleh Ikrar Nusa Bhakti tentu sangat beralasan mengingat negara Indonesia dalam usaha untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan sejak reformasi tahun 1997, terutama pasar modal yang sangat sensitif, dikhawatirkan dapat menurunkan mata uang rupiah atas mata uang asing.

Tanggapan adanya interupsi yang akan dilancarkan beberapa anggota DPR juga mendapat perhatian dari Ketua DPR Agung Laksono. Agung mengatakan bahwa kebebasan dan keterbukaan di Indonesia sekarang ini merupakan hasil penting dari iklim demokratisasi yang dicapai oleh gerakan reformasi. *"Karena itu, demokrasi bukanlah suatu tujuan yang dapat dicapai dengan menggunakan segala cara,"* kata Ketua DPR Agung Laksono saat menyampaikan pidato pembukaan masa persidangan I tahun sidang 2006-2007 di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.⁶

Meskipun tidak ada "hujan interupsi" seperti yang di isukan dan menjadi pemberitaan di media massa beberapa waktu lalu, Presiden Susilo Bambang

⁵ <http://kompas.com/kompas-cetak/0410/14utama/1325521.htm>, Kamis 20 Oktober 2004, 03:45 WIB

⁶ <http://media-indonesia.com> dlm Rubrik POLKAM Rabu 16 Agustus 2006-16:17 WIB

Yudhoyono harus menghadapi tanggapan-tanggapan yang dilayangkan oleh beberapa anggota DPR/MPR dan media massa yang meliput pemberitaan seputar Pidato tahunan Presiden diantaranya mengenai isu "hujan Interupsi" yang akan dilakukan oleh Anggota DPR dalam Pidato Presiden hingga data statistik jumlah penduduk miskin yang kadaluarsa.

Media Indonesia Online banyak mengangkat masalah seputar tidak terjadinya "hujan interupsi" dalam Pidato Presiden serta wacana rekonsiliasi antara mantan Presiden Megawati dengan Presiden Yudhoyono. Sedangkan Kompas Cyber Media (KCM) Online lebih banyak mengangkat data statistik kemiskinan yang sedikit bermasalah.

Di antara pemberitaan yang diturunkan oleh Media Indonesia Online meliputi pemberitaan seputar tidak terjadinya interupsi dalam Pidato Tahunan Presiden dan wacana rekonsiliasi antara Mega Dan presiden Yudhoyono, yaitu :

a. Pemerintah Bantah Intervensi DPR Saat Pidato Presiden

Pemerintah membantah adanya intervensi terhadap DPR sehingga tidak ada interupsi saat pembacaan pidato kenegaraan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Rapat Paripurna DPR pada Rabu (16/8) lalu dalam rubrik POLKAM dengan judul berita **Pemerintah Bantah Intervensi DPR Saat Pidato Presiden** dengan isi berita; *"Ini justru merupakan bentuk kematangan berdemokrasi di Indonesia. Dengan cara seperti ini, kita bisa menjaga kekhidmatan dari pidato kenegaraan. Tidak ada sama sekali intervensi pemerintah. Ini murni kematangan demokrasi,"* ujar Juru Bicara Kepresidenan

Andi Mallarangeng kepada wartawan usai mengikuti pidato kenegaraan Presiden di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/8).⁷

b. Sejumlah Pejabat dan Pengusaha Melobi Mega

Media Indonesia online juga menurunkan pemberitaan seputar wacana rekonsiliasi yang dipandang penting oleh banyak pengamat politik dan ekonomi bagi lancarkan program kerja serta kesolitan elit politik Indonesia, yang dapat meningkatkan kepercayaan pasar dengan judul pemberitaan **Sejumlah Pejabat dan Pengusaha Melobi Mega** dengan isi berita; Sejumlah pejabat dan pengusaha belakangan ini berupaya melobi mantan Presiden Megawati Soekarnoputri untuk melakukan rekonsiliasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, kubu Megawati tidak menanggapi upaya tersebut, karena merasa tidak memiliki persoalan dengan Presiden yang perlu direkonsiliasikan. *"Beberapa menteri, gubernur, dan pengusaha yang sibuk melobi Ibu Mega dan orang-orang dekatnya untuk mempertemukan dengan Bapak Presiden. Kan tidak ada masalah di antara Pak SBY dengan Ibu Mega, kenapa mesti sibuk mengurus rekonsiliasi?"* kata Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumolo, Minggu (20/8).⁸

c. Taufik Kiemas: Tak ada Masalah Antara Mega dan Yudhoyono

Mengenai adanya isu rekonsiliasi antara Mega dan Presiden Yudhoyono Media Indonesia Online juga menurunkan berita tentang tanggapan Taufik Kiemas, suami Mega dengan judul pemberitaan **Taufik Kiemas: Tak ada Masalah Antara Mega dan Yudhoyono** dengan isi berita; Taufik Kiemas kembali menegaskan bahwa Megawati sama sekali tidak ada persoalan dengan

⁷ <http://media-indonesia.com> dlm rubrik POLKAM Minggu, 20 Agustus 2006-05:52 WIB

⁸ <http://media-indonesia.com> dlm rubrik POLKAM Minggu, 20 Agustus 2006-20:21 WIB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Jadi apa yang mau direkonsiliasi, karena memang tidak ada persoalan," katanya. Pemerintahan yang dipimpin Yudhoyono, kata Taufik, sejatinya harus dijaga sampai 2009.⁹

Sedangkan Kompas Cyber Media (KCM) online lebih banyak mengangkat data statistik jumlah penduduk miskin yang sedikit bermasalah diantaranya :

a. DPR Minta Klarifikasi Data Kemiskinan

Pemberitaan ini mengenai tanggapan Ketua Komisi VI DPR RI Didik J. Rachbini, Pengamat ekonomi dalam Tim Indonesia Bangkit serta tanggapan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginanjar Kartasmita seputar pencapaian penurunan angka kemiskinan yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato kenegaraan pada Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta. Dengan judul pemberitaan **DPR Minta Klarifikasi Data Kemiskinan** dengan isi berita; Didik mengatakan *"Saya tidak terlalu yakin dengan angka-angka itu. Angka kemiskinan terakhir dikatakan mengalami penurunan padahal bila dilihat justru mengalami peningkatan, itu berarti ada yang disembunyikan oleh menteri-menteri,"* kata politisi Partai Amanat Nasional itu usai sidang paripurna di gedung DPR/MPR RI. Ketika menyampaikan pidato kenegaraan, Presiden mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir angka kemiskinan di Indonesia telah mengalami penurunan secara signifikan. Kepala Negara mengatakan tingkat kemiskinan di Indonesia telah menurun dari 23,4 persen pada 1999 menjadi 16 persen dari jumlah seluruh penduduk pada 2005.¹⁰

⁹ <http://media-indonesia.com> dlm rubrik POLKAM Minggu, 20 Agustus 2006-05:52 WIB

¹⁰ <http://www.kompas.com/ver1/ekonomi/0608/16/161544.htm>. Rabu, 16 Agustus 2006-16:15 WIB

b. Data Soal Kemiskinan Diragukan-Wapres: Angka-angka Itu Benar

Serta tanggapan senada yang juga dilayangkan oleh Sejumlah ekonom dan pengamat yang tergabung dalam Tim Indonesia Bangkit, antara lain Dradjad Wibowo, Iman Sugema, Fadhil Hasan, Hendri Saparini, Ichsanuddin Noorsy, dan Aviliani, menyampaikan kajian tentang data kemiskinan dan pengangguran tersebut pada konferensi pers di Jakarta, Jumat (18/8). Dalam pidato kenegaraan Rabu lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan angka kemiskinan turun dari 23,4 persen pada tahun 1999 menjadi 16 persen pada tahun 2005.

Padahal Tim Indonesia Bangkit menilai, penurunan angka itu tidak menggambarkan kondisi riil saat ini karena diambil dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Februari 2005 yang memotret kondisi sebelum pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Oktober 2005. Badan Pusat Statistik (BPS) telah memutakhirkan data kemiskinan melalui Susenas Juli 2005 dan Maret 2006. "Akan tetapi, data Susenas yang lebih up date justru belum dilaporkan. Kami menduga ini karena ada lonjakan angka kemiskinan," kata Hendri Saparini.¹¹

c. Ketua DPD Pahami Kealpaan Pemerintah Soal Angka Kemiskinan

Jika banyak Anggota DPR dan para pengamat ekonomi yang menyangsikan data statistik kemiskinan dalam pidato presiden terhadap implikasi kedepannya atas akurasi data yang akan mempengaruhi kebijakan dalam RAPBN 2007. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lebih menerima pidato tersebut sebagai

¹¹ <http://www.kompas.com/ver3/ekonomi/0609/14078.htm> Rabu, 19 Agustus 2006-16:00 WIB

usaha pemerintah. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita tidak mempermasalahkan akurasi data tentang pengangguran dan kemiskinan yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab, hal paling penting adalah bagaimana pemerintah dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan tersebut.

Dengan judul pemberitaan **Ketua DPD Pahami Kealpaan Pemerintah Soal Angka Kemiskinan** dengan isi berita; Ginandjar mengatakan "*Kita tidak bicara data yang terpenting adalah langkah-langkah apa yang dilakukan oleh presiden untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan,*" ujarnya usai mengikuti pidato kenegaraan Presiden di gedung DPD, Jakarta, Rabu (23/8).¹²

Dari pemberitaan yang diturunkan oleh Media Indonesia Online (MI Online) dan Kompas Cyber Media (KCM) kita dapat melihat betapa pentingnya pemberitaan yang dilakukan oleh media massa terutama media online yang dapat menyampaikan informasi secara cepat kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi secara cepat dan berimbang.

Namun demikian kita juga dapat melihat adanya pola pemberitaan yang terstruktur dalam pemberitaan pidato tahunan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hal ini dimungkinkan karena media tidak berdiri sendiri banyak hal-hal lain yang mempengaruhi objektivitas media online dalam menulis pemberitaan. Misalnya, dalam menanggapi Pidato Tahunan Presiden tahun 2006. Media Indonesia Online cenderung menurunkan pemberitaan seputar tidak terjadinya interupsi dan wacana rekonsiliasi antara Mega dan Presiden Yudhoyono

¹² <http://www.kompas.com/ver1/ekonomi/0608/140307.htm> Rabu, 23 Agustus 2006-14:03 WIB

sedangkan Kompas Cyber Media lebih mengangkat pemberitaan seputar Statistik jumlah penduduk miskin dalam pidato Presiden. Mengapa bisa demikian?

Terlepas dari objektif atau tidaknya pemberitaan, media online telah membentuk opini tersendiri bagi publik pembacanya. Setiap institusi media memiliki cara pandang yang berbeda-beda dalam melakukan *justifikasi* terhadap suatu realitas. Hal ini dapat terjadi karena setiap media memiliki ideologi dan kepentingan yang berbeda-beda, sehingga pengambilan sudut pandang pemberitaan disesuaikan dengan ideologi media bersangkutan.

Dalam penelitian ini, akan terlihat bagaimana dua media online yakni Kompas Cyber Media (KCM) dan Media Indonesia online (MI Online) mengkonstruksi, memaknai serta melakukan pembenaran realitas atas pemberitaan tentang Pidato Tahunan Presiden dalam Sidang Tahunan DPR/MPR tahun 2006.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diambil rumusan masalah penelitian sebagai berikut ini:

1. Bagaimana Media Online, Kompas Media Cyber dan Media Indonesia Online dalam membingkai (*framing*) pemberitaan tentang Pidato tahunan Presiden tahun 2006 ?
2. Bagaimana perbedaan kedua media online, Kompas Cyber dan Media Indonesia Online dalam membingkai (*framing*) pemberitaan ?

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan redaksi media online Kompas Cyber dan Media Indonesia online dalam membingkai (*framing*) isi teks pemberitaan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana media online, Kompas Cyber Media dan Media Indonesia online membingkai (*framing*) pemberitaan tentang Pidato tahunan Presiden tahun 2006
2. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan media online Kompas Cyber Media dan Media Indonesia online dalam membingkai (*framing*) pemberitaan tentang Pidato tahunan Presiden tahun 2006.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan redaksi media online Kompas Cyber Media dan Media Indonesia online, dalam membingkai isi teks pemberitaan tentang Pidato tahunan Presiden tahun 2006.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Analisis framing merupakan analisis yang baru dan dapat dikatakan jarang dilakukan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian, referensi, dan bacaan bagi yang meminati studi analisis framing. Analisis framing berkembang dari pandangan konstruksionis yang melihat bagaimana media dan berita dilihat dan pada akhirnya dapat mengetahui

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masing-masing media online dalam membingkai berita.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran para khalayak untuk lebih mengetahui bagaimana berita itu disajikan dan dapat memahami bagaimana cara media online mengemas berita.

E. Kerangka Teori

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian diatas maka penelitian ini menggunakan beberapa kerangka teori yang dipandang perlu untuk dijadikan pisau analisis pada penelitian ini. Kerangka teori tersebut meliputi:

1. Komunikasi sebagai Produksi Pesan

Komunikasi merupakan salah satu aktifitas manusia yang menjadi kebutuhan mendasar manusia, dengan berkomunikasi manusia dapat berinteraksi antara manusia yang satu dengan lainnya, dengan berkomunikasi manusia dapat mengaktualisasikan ide, gagasan, cita-cita dan keinginannya kepada diri sendiri dan kepada orang lain.

Tidak ada definisi yang benar dan salah dalam mendefinisikan komunikasi. Seperti teori dan model, definisi dilihat pada konteks dan kemanfaatannya untuk menjelaskan suatu masalah yang didefinisikan serta mengevaluasikannya jika ada hal baru yang diyakini kebenarannya. Komunikasi tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia

komunikasi transmisi menitikberatkan pada bukan bagaimana komunikan menerima pesan, akan tetapi sejauh mana pesan yang dimaksudkan oleh komunikator sesuai dengan yang diterima oleh komunikan.¹⁴

Secara umum komunikasi model transmisi menyertakan pengirim (*sender*), penerima dan medium melalui pesan-pesan yang dikirimkannya. Gangguan (*noise*) adalah sesuatu yang terjadi di antara pengiriman pesan tersebut. Dalam konteks media online, medium adalah jaringan internet yang memuat media online didalamnya, pengirim (*sender*) adalah wartawan atau penulis dan penerima pesan adalah setiap individu yang membuka dan membaca pesan di media online. Sedangkan *noise* atau gangguan terjadi diantara proses tersebut, gangguan bisa berupa kerusakan jaringan internet, gangguan satelit, salah penulisan berita, salah ketik dan lain-lain.

Menurut Lewin dan Slade, penggambaran proses komunikasi seperti ini terlihat mekanistik dan simplistik. Ketika komunikasi berlangsung individu yang mengirim sandi (*code*) dan proses komunikasi pada dasarnya adalah proses penyandian pesan agar dapat diterima dan dipahami oleh individu penerima. Sedangkan proses menerima pesan pada dasarnya adalah proses mengurai sandi (*decode*) dan menyandikan ulang agar dapat diterima sesuai dengan yang dimaksudkan pengirim.¹⁵

¹⁴ Virginia Nightingale (1996), *Studying Audiences: The Shock of The Real*, London and New York, Routledge. Hal 25-31

¹⁵ Eriyanto (2002), *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, LKiS, Yogyakarta. Hal 38-39

itu sendiri. Komunikasi telah menjadi bagian dari cara, gaya dan kebiasaan, kebudayaan kita sehari-hari.

John Fiske mengatakan untuk melihat suatu realitas dapat dipahami dengan dua cara : *pertama*, komunikasi sebagai proses transmisi pesan. Pandangan ini dikenal juga dengan cara pandang positivistik. *Kedua* komunikasi sebagai produksi pesan dan pertukaran makna atau disebut juga dengan cara pandang konstruksionis.

"The structure of this reflects the fact that there are two main schools in the study of communication. The first sees communication as the transmission of messages. It is concerned eith how senders and receivers encode and decode...the scond school sees communication as the production and exchange of meanings. It is concerned with how message, or texts, interact with people in order to produce meanings. That is, it is concerned with the role of texts in our culture".¹³

Cara pandang positivistik melihat komunikasi sebagai bentuk pengiriman pesan, bagaimana proses tersebut terjadi mulai dari pesan yang dikirim pengirim ke penerima serta bagaimana proses yang terjadi dalam pengiriman tersebut.

Model ini dikenal juga dengan istilah komunikasi transmisi Shanon dan Weaver yang menggambarkan komunikasi transmisi suatu sumber yang menciptakan pesan dan menyampaikannya melalui suatu saluran kepada seorang penerima dan si penerima kemudian mencipta ulang atau menyandakan balik pesan tersebut. Komunikasi ini bersifat *linier*, karena melihat komunikasi mengalir dari komunikator ke komunikan, diimana komunikator dilihat sebagai pihak yang aktif sedangkan komunikan sebagai pihak yang pasif. Dalam model ini,

¹³ Fiske, John (1990) *Introduction to Communication Studies* 2nd Edition, London and New York , Routledge. Hal 2-4

2. Komunikasi sebagai Produksi Makna

Komunikasi merupakan bagian dari teori masyarakat kontemporer pada saat ini memegang peranan sangat penting dalam hubungannya dengan perkembangan budaya masyarakat modern. James W. Carey mencoba menawarkan definisi kultural tentang komunikasi yang memiliki dampak yang cukup penting pada cara pandang hubungan antara komunikasi dan kebudayaan. Carey mengemukakan bahwa komunikasi adalah proses simbolik di mana realitas diproduksi, dipelihara, diperbaiki, dan diubah. "*communication is a symbolic process whereby reality is produced, maintained, repaired and transformed*".¹⁶

Berdasarkan definisi di atas Carey menggambarkan bahwa komunikasi dan realitas saling berhubungan. Komunikasi adalah proses yang tertanam dalam kehidupan kita sehari-hari yang menginformasikan cara kita menerima, memahami, dan mengkonstruksi pandangan kita terhadap realitas dan dunia. Proses komunikasi selalu berawal dari keinginan orang untuk menyampaikan keinginannya, baik itu dengan memberitahukan suatu pesan atau hanya menyampaikan pesan. Oleh sebab itu, dasar dari studi komunikasi ini adalah proses komunikasi yang intinya adalah menyampaikan pesan yang mengandung makna. Artinya pesan tidak mengalir begitu saja dari seorang komunikator kepada komunikan, hal ini di karenakan pesan ada karena di bentuk atau dikonstruksi terlebih dahulu atas kepentingan komunikan. Sehingga model komunikasi ini dikenal juga dengan komunikasi yang menggunakan cara pandang konstruksionis.

¹⁶ Carey, James W. Dalam Idy Subandy Ibrahim (2004) kata pengantar John Fiske, *Cultural and Communication Studies*. Sebuah Pengantar Paling Komperhensif, Yogyakarta, Jalasutra. Hal X

Berbeda dengan cara pandang positivistik, pandangan konstruksionis melihat komunikasi sebagai proses produksi dan pertukaran makna. Titik fokus dari pandangan ini adalah bagaimana pesan diciptakan oleh komunikator dan bagaimana pesan tersebut secara aktif ditafsirkan oleh penerima.

Ada dua karakteristik penting dari pendekatan konstruksionis. *Pertama*, pendekatan konstruksionis menekankan pada pemaknaan dan proses bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realitas. Makna bukanlah sesuatu yang absolut, konsep statik yang ditemukan dalam suatu pesan. Makna adalah suatu proses aktif yang ditafsirkan oleh seseorang dalam suatu pesan. *Kedua*, pendekatan konstruksionis memandang kegiatan komunikasi sebagai proses yang dinamis. Pendekatan ini melihat bagaimana pembentukan pesan dari sisi komunikator, dan dalam sisi penerima ia melihat bagaimana konstruksi makna individu ketika menerima pesan. Dalam menyampaikan pesan individu merangkai perkataan tertentu dalam memberikan gambaran tentang realitas. Setiap komunikator akan memberikan pemaknaan tersendiri terhadap suatu peristiwa dalam konteks pengalaman, pengetahuannya sendiri.¹⁷

Gambaran komunikasi sebagai proses produksi makna dikemukakan juga oleh Dan Nimino dalam Alo Liliweri :

Bahwa dalam berkomunikasi orang bertukar citra-citra atau makna-makna. Makna ini melalui lambang-lambang, jadi unsur primer dalam komunikasi meliputi :

1. Lambang
2. Hal yang dilambangkan
3. Interpretasi yang menciptakan lambang yang bermakna.¹⁸

¹⁷ Graeme Burton (1990), *More Than Meet The Eye: An Introduction to Media Studies*, London : Edwar Arnold dalam Eriyanto. Hal 40-41

¹⁸ Liliweri, Alo (1991) *Memahami Peran Komunikasi Massa Dalam Masyarakat*, Bandung, Citra Aditya Bakti. Hal 23-24

Pesan tidak dimaknai dalam arti yang statis, tetapi saling dipertukarkan dan disebar. Pesan dibentuk secara bersama-sama antara pengirim dan penerima atau pihak lain yang turut berkomunikasi dan dihubungkan dengan konteks sosial dimana mereka berada. Makna tidak dapat terjadi atau terbentuk begitu saja. Dengan demikian pembentukan makna merupakan suatu yang kreatif, luas, dan sangat subyektif sehingga pesan diartikan sebagai pemaknaan bersama dalam kehidupan sosial.

3. Media sebagai Saluran Komunikasi Politik

Sebelum membahas mengenai “saluran komunikasi” terlebih dahulu akan diuraikan beberapa pengertian mengenai “komunikasi politik”. Ada dua istilah penting yang harus dijelaskan “komunikasi” dan “politik”. Ruben mendefinisikan “komunikasi sebagai proses di mana seseorang di dalam hubungannya dengan kelompok, organisasi, dan masyarakat merespons dan menciptakan pesan untuk melakukan hubungan dengan lingkungan dan orang lain”,¹⁹ Shannon secara sederhana menyatakan bahwa “komunikasi adalah pentransmisian dan penerimaan informasi”. Sedangkan Lawrence Frey, Carl Botan, Paul Freidman, dan Gary Kreps secara bersama melihat “komunikasi sebagai manajemen pesan untuk menciptakan makna tertentu”.²⁰

¹⁹ Brent D. Ruben, *Communication and Behavior*, 3rd edition, (Prentice Hall Englewood Cliffs, N.J., 1992), hlm. 9 dalam Zen, Fathurin, *NU Politik: Analisis Wacana Media*, Yogyakarta, LKiS, 2004., hlm 63.

²⁰ EM. Griffin, *A First Look at Communication Theory*, 3rd edition, (New York: The McGraw-Hill Companies, 1997)., hlm 19

Sedangkan menurut beberapa ahli lainnya mendefinisikan “komunikasi sebagai pengalihan informasi untuk memperoleh tanggapan”(Aranguren, 1967 : 11); “pengkoordinasian makna antara seseorang dengan khalayak” (De fluer, 1970 : 91); “saling berbagi informasi, gagasan atau sikap” (Schramm, 1974 : 6); “saling berbagi unsur-unsur perilaku, atau modus kehidupan melalui perangkat-perangkat aturan” (Cherry, 1961 : 6); “penyesuaian pikiran, penciptaan perangkat simbol bersama di dalam pikiran para peserta” (Merill dan Lowenstein, 1971 : 5-6); “suatu peristiwa yang dialami secara internal dan murni personal yang dibagi dengan orang lain” (Fabun, 1968 : 15); “pengalihan informasi dari satu orang atau kelompok kepada yang lain, terutama dengan menggunakan simbol” (Theodorson, 1961 : 62). Dari definisi yang begitu banyak diungkapkan oleh para ilmuwan menyebabkan Nimmo menyebut definisi-defini itu sebagai diobral bergantung pada titik pandangnya.²¹

Salah satu definisi yang lebih mendekati pada pengertian yang dimaksud bila dikaitkan dengan pengertian “pesan politik” melalui media adalah definisi yang dikemukakan oleh Lawrence Frey dkk. Disini ia mengatakan “ komunikasi merupakan manajemen pesan untuk menciptakan makna tertentu”. Artinya, pesan yang ingin dikomunikasikan oleh seseorang kepada atau dengan orang lain hendaknya diatur dan disesuaikan dengan kemampuan si penerima, sehingga esensi makna dari pesan itu tidak menyimpang terlalu jauh dai yang diharapkan.

Sebagaimana keragaman pengertian komunikasi, pengertian politik juga dikemukakan secara berbeda oleh para ahli. Batasan paling klasik disampaikan

²¹ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. Rosda Karya, Bandung., hlm. 5

oleh Lasswell (1958), yang menyatakan bahwa “politik adalah siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana”. Sedangkan Easton (1953) mengatakan bahwa “politik adalah pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang”. Dahl (1963) menyatakan, “politik sering diartikan sebagai kekuasaan dan pemegang kekuasaan”. Politik, menurut Banfield (1961) adalah “pengaruh”, atau menurut Weinstein (1971) “politik adalah tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan atau memperluas tindakan lainnya”. Mark Roelofs mengatakan bahwa “politik adalah pembicaraan atau lebih tepatnya kegiatan politik (berpolitik) adalah berbicara (berkomunikasi)”. Meskipun demikian, menurutnya politik tidak hanya pembicaraan dan tidak semua pembicaraan adalah politik. Artinya, politik adalah hakikat pengalamannya dan bukan kondisi dasarnya.²²

Selanjutnya kita akan membahas “komunikasi politik”. Menurut Gabriel Almond “komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik sehingga terbuka kemungkinan bagi para ilmuwan politik untuk membandingkan berbagai sistem politik dengan latar belakang budaya yang berbeda”.²³ Artinya semua sistem politik yang pernah ada, yang sekarang ada, dan yang akan datang mempunyai persamaan-persamaan mendasar, yaitu adanya kesamaan fungsi yang dijalankan oleh semua sistem politik.

Blake dan Haroldsen (1975) dalam bukunya *A taxonomy of Concepts in Communication* menyatakan bahwa “komunikasi politik adalah komunikasi yang memiliki pengaruh aktual dan potensial mengenai fungsi dari pernyataan politik,

²² Zen, Fathurin., *NU Politik: Analisis Wacana Media*, Yogyakarta, LKiS, 2004., hlm 65-66

²³ Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun, *Indonesia dan Komunikasi Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1993., hlm. 21 dalam Zen, Fathurin., *Ibid.*, hlm 65.

atau entitas politik lainnya”.²⁴ Sedangkan Nimmo mendefinisikan “komunikasi politik sebagai kegiatan komunikasi yang berdasarkan konsekuensinya (aktual maupun potensial) mengatur kegiatan manusia di dalam situasi konflik”.²⁵ Jika kita melihat definisi Blake diatas maka jelas bahwa untuk mengetahui “pernyataan politik” dan fungsi atau pengaruhnya maka media massa merupakan salah satu saluran komunikasi yang paling penting, selain komunikator dan isi pesan itu sendiri.

4. Media Online dan Konstruksi Realitas

Media online merupakan bagian dari media massa yang dapat kita temui di internet dan cukup diterima oleh masyarakat saat ini. Perkembangan teknologi yang begitu cepat telah merubah cara pandang masyarakat akan kebutuhan informasi. Sebagai media massa, media online juga menggunakan kaidah-kaidah jurnalistik dalam sistem kerjanya. Kompas dan Media Indonesia merupakan dua media massa dari sekian banyak media massa di indonesia yang memanfaatkan media online sebagai bagian dari proses menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Sama seperti surat kabar, media online memiliki berbagai macam rubrik dan bagian lain dari media cetak.. Namun demikian media online memiliki beberapa kelebihan dibandingkan media cetak lain, diantaranya berita yang *up to date*, pembaca media online dapat mengakses berita hari ini secara langsung tanpa harus membaca berita esok harinya. Di media online pembaca dapat berinteraksi

²⁴ Blake Reed H. and Ewin O. Haroldsen, *A Taxonomy of Concept in Communication*, New York : Hasting House Publieshers, 1975., hlm 44 dlm Zen Fathurin., *Ibid.*, hlm 66

²⁵ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik*, hlm 9 dalam Zen., *Ibid.*, hlm 66

secara langsung dengan redaksi media dengan memberikan komentar atau tanggapan terhadap pemberitaan yang dimuat secara langsung melalui kolom tanggapan yang di sediakan oleh media online bersangkutan.

Sebetulnya tak ada perbedaan yang terlalu signifikan antara media online dengan media cetak. Perbedaan yang paling mencolok adalah mediumnya, media online secara *virtual* dan media cetak secara tercetak. Karena itu, secara teknis ada hal-hal tertentu yang mau tidak mau membuat keduanya berbeda. Perbedaan-perbedaan teknis media cetak dan media online itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Perbedaan Teknis Media Online dengan Media Cetak

Unsur	Media Cetak	Media Online
Pembatasan Panjang Naskah	5 hingga 7 halaman kuarto	Tak ada batasan panjang naskah, karena halaman web bisa menampung naskah sepanjang apapun. Namun demi kecepatan akses, keindahan desain dan alasan lain maka perlu dihindari penulisan naskah yang panjang.
Prosedur naskah	Naskah harus di-ACC oleh redaksi sebelum dimuat	Sama saja, namun beberapa media online mempercayakan kepada wartawan untuk men-upload sendiri tulisannya.
Editing	Kalau sudah naik cetak(di-film-kan pada proses percetakan) tidak dapat di edit lagi.	Walaupun sudah online, masih bisa diedit dengan leluasa.
Tugas desainer atau layouter	Tiap edisi, desainer atau layouter tetap bekerja untuk menyelesaikan desain pada edisi tersebut	Desainer dan Programmer cukup bekerja sekali saja, yakni diawal pembuatan situs web. Selanjutnya tugas mereka hanya pada masalah maintenance atau ketika perusahaan memutuskan untuk merubah desain dan sebagainya. Karena setiap kali redaksi

		meng-upload naskah, naskah langsung 'masuk' ke desain secara otomatis.
Jadwal terbit	Berkala (harian, mingguan, bulanan dan sebagainya)	Kapan saja bisa, tidak ada jadwal khusus, kecuali untuk jenis-jenis tulisan/ rubrik tertentu.
Distribusi	Walau sudah selesai dicetak, media tersebut belum bisa langsung dibaca oleh khalayak ramai sebelum melalui proses distribusi.	Begitu di- <i>upload</i> , setiap berita dapat langsung dibaca oleh semua orang di seluruh dunia yang memiliki akses internet.

Sumber : <http://jonru.multiply.com/journal/item/128>. 5 September 2006-12:304 WIB

Dari tabel diatas, kita dapat melihat dengan jelas bahwa sebagian besar perbedaan jurnalistik media cetak dengan media online hanyalah pada masalah-masalah teknis.

Sedangkan persamaan antara media online dan media elektronik lainnya seperti radio dan televisi terletak pada sifatnya. Ketiganya selalu dituntut untuk menyajikan berita yang paling *up to date* secepat mungkin. Ketiganya juga biasa untuk tidak perlu menunggu semua berita terkumpul. Begitu ada data, walaupun sedikit, langsung dilaporkan. Jika ada perkembangan baru mengenai peristiwa tersebut, maka tinggal dilaporkan lagi. Karena itu, aturan penulisaan di dalam media online cenderung lebih bebas, tidak terlalu terpaku pada kaidah-kaidah bahasa dan jurnalistik yang berlaku umum.²⁶

Kompas dan Media Indonesia merupakan salah satu media massa cetak yang membuat dan menggunakan media online sebagai salah satu proses penyampaian pesan atau pemberitaan dari media ke khalayak atau masyarakat.

²⁶ <http://jonru-multiply.com/journal/item/128>, Jurnalistik untuk Media Online, 5 September 2006-12:34 WIB

Kompas memberi nama media onlinenya dengan nama Kompas Cyber Media (KCM) sedangkan Media Indonesia memberi nama Media Indonesia Online (MI Online).

Sama seperti media massa lainnya, media online ketika akan menentukan topik atau tema untuk pemberitaan yang akan ditampilkan melakukan kegiatan konstruktivitas. Wartawan dapat mengemas berita dengan perspekti, gaya bahasa, retorika, dan *commonsense* yang dikehendaki.²⁷ Dari pernyataan Gamson dan Modigliani bisa disimpulkan bahwa apa, kapan, dan bagaimana suatu realitas akan ditampilkan dalam suatu media massa, akan tergantung dari bagaimana cara penulis/ penyusun atau wartawan mengemasnya. Posisi penulis/ penyusun menempati kedudukan yang strategis dalam hal menentukan tampilan awal tulisan walaupun nantinya akan ada *gatekeeper* lain yang harus dilalui.

Media online merupakan bagian dari media massa sehingga nilai-nilai jurnalistik atau pers harus tetap diutamakan. Ada lima fungsi utama pers yang berlaku universal. Disebut universal, karena kelima fungsi tersebut dapat ditemukan pada setiap negara di dunia yang menganut paham demokrasi, yakni:

1. **Informasi (*to inform*)**, ialah menyampaikan informasi secepat-cepatnya kepada masyarakat yang seluas-luasnya. Dan harus memenuhi kriteria dasar: aktual, akurat, faktual, menarik atau penting, benar, lengkap-utuh, jelas-jernih, jujur-adil, berimbang, relevan, bermanfaat, etis.
2. **Edukasi (*to educate*)**, Apa pun informasi yang disebarluaskan pers hendaknya dalam kerangka mendidik (*to educate*). Inilah yang membedakan pers sebagai lembaga kemasyarakatan dengan lembaga kemasyarakatan lain. Sebagai lembaga ekonomi, pers memang dituntut berorientasi komersial untuk mendapatkan keuntungan finansial. Namun orientasi dan misi komersil tersebut sama sekali tidak boleh mengurangi, apalagi meniadakan fungsi dan tanggung jawab sosial pers. Seperti

²⁷ Gamson dan Modigliani, dalam Agus Sudibyo (1990), *Citra Bung Karno: Analisis Berita Pers Orde Baru*, Yogyakarta : BIGRAF Publishing. Hal 29

ditegaskan Wilbur Schramm dalam *Men, Messages, and Media* (1973), bagi masyarakat, pers adalah *watcher, teacher, and forum* (pengamat, guru, dan forum).

3. **Koreksi (to influence)**, Pers adalah pilar demokrasi keempat setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam kerangka ini, kehadiran pers dimaksudkan untuk mengawasi atau mengontrol kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif agar kekuasaan mereka tidak menjadi korup dan absolut. Seperti ditegaskan Lord Acton, pujangga Inggris abad 18, kekuasaan cenderung disalahgunakan dan kekuasaan yang bersifat absolut sering disalahgunakan secara absolut pula (*power tends to corrupt and power absolute tends to corrupt absolutely too*). Namun dalam mengemban fungsi kontrol sosial, pers pun tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. **Rekreasi (to entertain)**, Pers adalah menghibur. Pers harus mampu memerankan dirinya sebagai wahana rekreasi yang menyenangkan sekaligus yang menyedihkan bagi semua lapisan masyarakat.
5. **Mediasi (to mediate)**, Pers sebagai penghubung atau fasilitator. Dengan kemampuan yang dimilikinya pers telah menghubungkan berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia dengan kita yang duduk di ruang tamu atau sedang bersantai di sofa. Penjelasan inilah yang telah menghantarkan McLuhan dalam bukunya *Understanding Media* (1966) sampai pada kesimpulan: pers adalah perpanjangan dan perluasan manusia (*the extended of man*).²⁸

Terlepas dari lima fungsi media di atas, dalam menurunkan pemberitaan atau dalam menyampaikan informasi, media online tidak lepas dari pemahaman akan konstruksi media atas pemberitaan atau informasi yang dimiliki media kepada masyarakat.

Adapun keuntungan jurnalisme Online, seperti yang tertulis dalam buku *Online Journalism. Principle and Practices of News for The Web* (Holcomb Hathaway Publishers, 2005),²⁹ sebagai berikut :

1. **Audience Control**. Jurnalisme online memungkinkan audience untuk bisa lebih leluasa dalam memilih berita yang ingin didapatkannya.
2. **Nonliability**. Jurnalisme online memungkinkan setiap berita yang disampaikan dapat berdiri sendiri sehingga audience tidak harus membaca secara berurutan untuk memahami berita.

²⁸ Sumandiria, Haris (2005), *Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature*. Remaja Rosdakarya, Bandung. Hal 32-35

²⁹ <http://detikinet.wordpress.com/2006/05>. Posted by donny on 14th may 2006

3. *Storage and retrieval*. Online jurnalisme memungkinkan berita tersimpan dan diakses kembali dengan mudah oleh audience.
4. *Unlimited Space*. Jurnalisme online memungkinkan jumlah berita yang disampaikan/ ditayangkan kepada audience dapat menjadi jauh lebih lengkap ketimbang media lainnya.
5. *Immediacy*. Jurnalisme online memungkinkan bagi tim redaksi untuk menyertakan teks, suara, gambar, video dan komponen lainnya di dalam berita yang akan diterima oleh audience.
6. *Interactivity*. Jurnalisme online memungkinkan adanya peningkatan partisipasi audience dalam setiap berita.

Menggunakan paradigma Peter D. Moss (1999) dalam kata pengantar Dedy Mulyana “*wacana media massa termasuk surat kabar, merupakan konstruk kultural yang dihasilkan ideologi karena, sebagai produk media massa, berita surat kabar menggunakan kerangka tertentu untuk memahami realitas sosia*”.³⁰ Kerangka-kerangka tertentu ini bisa digunakan pada saat pemberian aksentuasi-aksentuasi tertentu pada realitas dilakukan. Apakah dengan mempertajam, memperlembut, mengagungkan, melecehkan, membelokkan, atau mengaburkan realitas tertentu.

Media massa juga menawarkan persepsi-persepsi berupa tulisan dalam media mereka kepada khalayaknya. Seperti yang dikatakan oleh Van Dijk:

“Banyak informasi dalam suatu realitas tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi implisit. Kata, klausa, dan ekspresi tekstual lainnya boleh jadi mengisyaratkan konsep pada posisi yang dapat diduga berdasarkan pengetahuan yang menjadi latar belakangnya. Ciri wacana dan komunikasi ini memiliki dimensi ideologis yang penting. Analisis atas apa yang tidak dikatakan terkadang lebih jelas dari pada studi atas apa yang sebenarnya dikatakan dalam teks”.(Van Dijk, 1991:113-114).³¹

Dari keterangan Van Dijk di atas, dapat kita maknai bahwa media telah melakukan konstruksi atas realitas yang ada, dimana konstruksi realitas ini

³⁰ Eriyanto (2002), *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, LKiS, Yogyakarta. Hal x

³¹ Van Dijk, *Op. Cit.*, h. xii

menghasilkan makna yaitu makna media. Konstruksi media atas realitas sosial menjadi realitas media seringkali dilakukan oleh pekerja media atau pemilik media berdasarkan pada asumsi yang dimilikinya. Sehingga isi media yang dibuat dengan konstruksi media, sarat dengan berbagai kepentingan yang bisa menyebabkan bias, tendensius dan menjadi semakin tidak obyektif. Dari latar belakang di atas dapat kita lihat bagaimana intensitas pemberitaan yang diturunkan oleh Media Indonesia Online dengan Kompas Cyber Media. Adanya kedekatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Surya Paloh sebagai pemilik Media Indonesia, merupakan faktor utama atas pemberitaan media Indonesia online yang cenderung menyikapi Pidato tahunan Presiden tahun 2006 dengan tulisan yang sedikit berpihak kepada presiden atas kritikan DPR dan pengamat ekonomi atas kadar luarsanya data statistik penduduk miskin yang disampaikan oleh Presiden. Berbeda dengan Kompas Cyber Media yang cenderung sedikit advokatif terhadap isu statistik penduduk miskin dalam pidato tahunan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam bukunya *Mediating The Message*, Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Rees secara kritis menyatakan “...and we establish that media do not always mirror reality”.³² (dan kami membuktikan bahwa media tidak selalu mencerminkan realitas).

Dalam pendekatan konstruksionis mempunyai cara pandang tersendiri dalam menilai bagaimana media massa, wartawan dan berita dilihat. Pertama, peristiwa merupakan hasil dari konstruksi. Realitas hadir karena dihadirkan oleh

³² Shoemaker, Pamela J. Reese, Steaphen D (1996) *Mediating The Message 2nd Edition*, New York, Longman Publishers USA. Hal 7

konsep subjektif wartawan, kemudian realitas juga tercapai lewat konstruksi, sudut pandang tertentu dari wartawan. Realitas bisa berbeda-beda tergantung pada bagaimana konsepsi ketika realitas tersebut dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan yang berbeda.³³ Sedangkan pandangan konsepsi positivis melihat realitas bersifat eksternal, jadi realitas itu ada dan hadir sebelum wartawan tiba. Realitas juga ada yang bersifat objektif, artinya peristiwa terjadi harus diambil dan diliput oleh wartawan secara utuh tanpa mengurangi atau menambahkan salah satu detail yang terjadi di lapangan.

Konsepsi positivis bertentangan dengan konsepsi konstruksionis, fakta atau realitas bukanlah sesuatu yang tinggal mengambil, ada dan menjadi bahan dari berita, fakta adalah hasil dari konstruksi.

Perbedaan cara pandang antara paradigma positivis dan konstruksionis dalam memandang realitas saling bertolak belakang. Dibawah ini perbedaan dari kedua paradigma.

Tabel 2. Perbedaan Paradigma Positivis dan Paradigma Konstruksionis

	Paradigma Positivis	Paradigma Konstruksionis
Perbedaan Ontologis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada fakta yang “riil” yang diatur kaidah-kaidah tertentu yang berlaku universal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fakta merupakan konstruksi atas realitas. Kebenaran suatu fakta bersifat relatif, berlaku sesuai konteks tertentu.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berita merupakan cermin dan refleksi kenyataan. Karena itu, berita harus sama dan sebangun dengan fakta yang hendak diliput. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berita tidak mungkin merupakan cermin dari realitas. Berita yang terbentuk merupakan konstruksi atas realitas.

³³ Herbert J Gans, “*Multiperspectival News*”, dalam Elliot D. Cohen, 1991 *Philosophical Issue in Journalism*, New York: Oxford University Press. Hal 191

Perbedaan Epistemologis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada suatu realitas objektif, di luar diri wartawan. Wartawan meliput realitas yang tersedia dan objektif. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realitas bersifat subjektif, dalam arti realitas merupakan hasil pemahaman dan pemaknaan wartawan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wartawan membuat jarak dengan objek yang hendak diliput, sehingga yang tampil bisa objektif. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wartawan tidak mungkin membuat jarak dengan realitas. Realitas merupakan produk transaksionis antar wartawan dengan objek yang hendak diliput.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realitas sebagai hasil liputan wartawan harus bersifat objektif, dalam arti memberitakan yang terjadi secara apa adanya. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realitas sebagai hasil liputan wartawan bersifat subjektif. Realitas yang terbentuk merupakan olahan dari pandangan atau perspektif dan pemaknaan wartawan ketika meliput suatu peristiwa.
Perbedaan Axiologis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai, etika, opini dan pilihan moral berada di luar proses peliputan berita. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai, etika, atau keberpihakan wartawan tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan dan pelaporan suatu peristiwa.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wartawan berperan sebagai pelapor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wartawan berperan sebagai partisipan yang menjembatani keragaman subjektifitas pelaku sosial.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tujuan peliputan dan penulisan berita: eksplanasi dan menjelaskan apa adanya. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tujuan peliputan dan penulisan berita: rekonstruksi peristiwa secara dialektis antara wartawan dengan peristiwa yang diliput.
Perbedaan Metodologis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kualitas pemberitaan: Liputan dua sisi, objektif, kredibel. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kualitas pemberitaan: Interaksi antara wartawan dan objek pemberitaan, intensitas
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyingkirkan opini dan pandangan subjektif dari pemberitaan dan memakai bahasa <i>straight</i>, tidak 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Opini dan subjektifitas tidak dapat dihilangkan, karena ketika meliput wartawan melihat dengan perspektif dan

	menimbulkan penafsiran yang beraneka.	pertimbangan subjektif dan bahasa selalu menimbulkan kecenderungan penafsiran yang beraneka.
--	---------------------------------------	--

Sumber : Guba dan Lincoln (1994) *Competing Paradigm in Qualitative Research*, disadur dari buku Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Agus Salim (penyunting). Hal 78

Dalam proses konstruksi realitas, Berger membagi tiga tahapan peristiwa. *Pertama*, eksternalisasi. Eksternalisasi yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental ataupun kegiatan fisik. *Kedua*, objektifitas. Objektifitas adalah hasil dari apa yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari hasil kegiatan eksternalisasi manusia. *Ketiga*, Internalisasi. Proses internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif kedalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial.³⁴

Konstruksi realitas yang dilakukan oleh media dapat memunculkan perspektif yang jauh. Hal ini disebabkan karena realitas yang dihadirkan oleh media dipahami secara terpisah-pisah dan sulit ditemukan keabsolutan realitas yang sebenarnya. Walau demikian seleksi akan terjadi baik disengaja atau tidak akan menimbulkan realitas yang berbeda. Semua ini terkait dengan bagaimana proses terjadinya pemilihan peristiwa dan mengarahkan khalayak dengan menonjolkan bagian-bagian tertentu dari peristiwa. Misalnya bagaimana Media Indonesia on-line mengangkat isu rekonsiliasi Antara Megawati dengan Presiden Yudhoyono setelah terbukti bahwa tidak terjadi isu interupsi atas pidato tahunan Presiden Yudhoyono. Sedangkan Kompas Media Cyber lebih memfokuskan

³⁴ Bungin, Burhan (2001), *Imajinasi Media Massa: Konstruksi dan Makna Realitas Sosial Iklan Televisi dalam Masyarakat Kapitalistik*, Jendela, Yogyakarta. Hal 11

pemberitaan seputar data statistik penduduk miskin dalam pidato tahunan Presiden yang sedikit bermasalah karena data tersebut adalah data tahun 2005.

Sehingga dapat kita tarik benang merah bahwa media massa melakukan dan tak lepas dari konstruksi makna dalam setiap tampilan medianya baik secara sadar maupun tidak, dengan maksud tertentu atau tidak. Konstruksi makna dilakukan dari level individu sebagai level terkecil bahkan sampai pada level tertinggi tercampuri oleh kepentingan-kepentingan institusi media bersangkutan.

5. Analisis Framing

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis framing model William A Gamson dan Modigliani. Dalam pandangan Gamson dan Modigliani, wacana media meneguhkan bagaimana publik mengerti dan memahami isu atau peristiwa yang muncul.³⁵ Asumsinya, media adalah salah satu sumber utama bagaimana publik atau khalayak mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai peristiwa-peristiwa publik. Pengetahuan itulah yang dipakai oleh seseorang ketika harus mempersepsikan peristiwa atau isu yang muncul.

Erving Gofman mengandaikan konsep framing sebagai kepingan-kepingan perilaku atau *strips of behavior* yang membimbing individu dalam memahami dan memaknai suatu realitas.³⁶ Framing sering juga diistilahkan dengan *frame* atau bingkai yang secara sederhana dapat dikatakan sebagai salah satu cara atau teknik untuk melihat bagaimana realitas yang dibingkai oleh media, dimana realitas yang hadir didalam media telah mengalami konstruksi ulang. Hal tersebut berarti bahwa

³⁵ Eriyanto(2002)., Ibid., hal 217

³⁶ Sobur, Alex (2001) *Analisis Teks Media*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung., hal 162

realitas yang sebenarnya telah mengalami perubahan makna, arti dan terkadang kehilangan bentuk aslinya dari realitas yang sebenarnya terjadi.

Sedangkan menurut William A. Gamson, analisis framing adalah suatu pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita sedangkan isu atau peristiwa publik adalah bagian dari konstruksi atas realitas. Wacana pada media adalah elemen penting untuk memahami dan mengerti pendapat umum yang berkembang atas suatu isu atau peristiwa. pendapat umum tidak cukup kalau hanya didasarkan pada data survai khalayak. Data-data tersebut perlu dihubungkan dan diperbandingkan dengan bagaimana media mengemas dan menyajikan suatu isu.

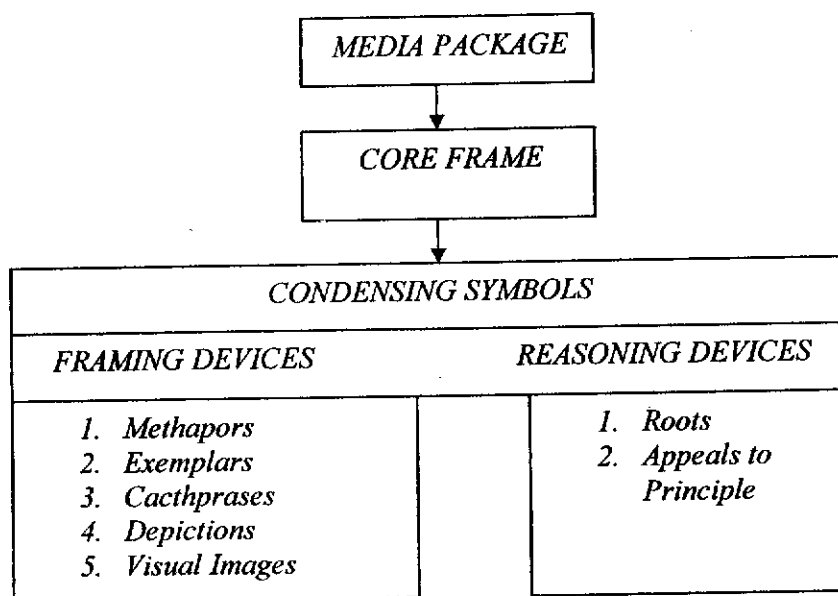
Menurut Gamson, dalam gerakan sosial paling tidak membutuhkan tiga frame/bingkai.³⁷ Pertama, *Aggregate frame*: proses pendefinisian isu sebagai masalah sosial. Bagaimana individu yang mendengar *frame* atas peristiwa tersebut sadar bahwa isu tersebut adalah masalah bersama yang berpengaruh bagi setiap individu. Kedua, *Consensus frame*. Proses pendefinisian yang berkaitan dengan masalah sosial hanya dapat diselesaikan oleh tindakan kolektif. *Frame* konsensus ini mengkonstruksi perasaan dan identifikasi dari individu untuk bertindak secara kolektif. Ketiga, *Collective action frame*. Proses pendefinisian yang berkaitan dengan kenapa dibutuhkan tindakan kolektif, dan tindakan kolektif apa yang harus dilakukan. *Frame* ini mengikat perasaan kolektif khalayak agar terlibat bersama-sama dalam protes dan gerakan.

³⁷ William A. Gamson, *Talking Politics*, (Cambridge University Press, 1992), dalam Eriyanto. *Ibid*, hal 221.

Frame juga dapat dilihat sebagai cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Dan pada akhirnya menentukan fakta-fakta apa yang diambil, bagian mana yang akan ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut. Gamson dan Modigliani menyebut cara pandang itu sebagai kemasan (*package*).

Keberadaan dari suatu kemasan (*package*) dalam berita media terlihat dari adanya gagasan sentral yang kemudian didukung oleh perangkat-perangkat wacana seperti kata, kalimat, pemakaian gambar atau grafik tertentu, proposisi, dan sebagainya. Semua elemen dan struktur wacana tersebut mengarah pada ide tertentu dan mendukung ide sentral dari suatu berita.³⁸ Model framing yang dibuat oleh Gamson dan Modigliani dapat digambarkan pada skema dibawah ini:

Skema 3. Model Gamson dan Modigliani



³⁸ William A. Gamson dan A. Modigliani, dalam Eriyanto, Ibid, hal 225

Sumber : Diadopsi dari William dan Modigliani, "*Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power A constructionist Approach*", *Journal of Sociology*, Vol. 95, No. 1, July 1989, hlm. 3, dalam Alex Sobur., hal 177

Dalam pandangan Gamson, *framing* dipahami sebagai seperangkat gagasan atau ide sentral ketika seseorang atau media memahami dan memaknai suatu isu. Ide sentral ini, akan didukung oleh perangkat wacana lain sehingga antara satu bagian wacana dengan bagian lainnya saling kohesif dan saling mendukung.

Misalnya berita Pidato tahunan Presiden dalam sidang tahunan DPR tanggal 16 Agustus 2006 pada media online, dalam teks berita tersebut kita bisa melihat bagaimana frame ini akan didukung oleh perangkat wacana lain; Masalah statistik penduduk miskin dalam pidato tahunan tersebut sedikit bermasalah, Kompas menurunkan pemberitaan tersebut dengan pernyataan beberapa anggota DPR dan Ekonom dalam Indonesia Bangkit yang menanggapi masalah tersebut merupakan masalah serius sehingga perlu adanya perhatian dari semua pihak. Dari pemakaian kalimat, kata, metafora, dan sebagainya, yang kesemuanya saling mendukung saling isi, menuju satu titik pertemuan; ide sentral dari suatu berita.

6. Ideologi Media Massa

Pertanyaan yang muncul apakah media massa mempunyai ideologi? Jika media berideologi apakah dapat dikatakan bahwa media massa tersebut tidak lagi independen dan bebas nilai. Althusser mengatakan bahwa ideologi adalah sistem dari representasi: yang satu menjelaskan yang lainnya. arti yang berada didalam

representasi memiliki arti atau nilai posisi yang sama dengan yang dibawa oleh ideologi, setidaknya ideologi dominan dalam budaya kita.

Media massa merupakan rumah produksi pesan dalam relasi ekonomi kapital tidak dapat dilepaskan dari ideologi dominan para pemilik media. Otoritas produksi pesan yang terselubung dalam berita ada ditangan para pemilik media.

Menurut James Lull :

*“Ideologi yang ditransmisikan melalui media dalam konteks politik-ekonomi-budaya sebagian diwakili oleh bahasa, diartikulasikan serta diinterpretasikan melalui bahasa berikut kode dan cara yang sangat cermat lainnya, termasuk bentuk visual dan musik yang kemudian diinterpretasikan lebih lanjut dan digunakan oleh orang-orang dalam interaksi sosial sehari-hari”.*³⁹

Dominasi ideologi menempatkan media massa sebagai mesin produksi sekaligus mesin distribusi dari pesan-pesan yang merupakan rekonstruksi dari relasi yang eksplotatif. Althusser menyebut proses tersebut sebagai proses yang dijalankan oleh aparat ideologi negara (*ideological state apparatuses*) yang tidak jauh berbeda dengan aparat represif negara (*repressive state apparatuses*), misalnya angkatan bersenjata, angkatan kepolisian dan lain-lain.⁴⁰

Namun demikian media massa juga menjadi mesin budaya yang secara konsisten dan sesuai dengan kelas dominan dimana media tersebut berkembang. Media massa juga menjadi media sosialisasi ideologi kelas tertentu. Misalnya berkembangnya media massa partisan partai-partai politik atau media alternatif budaya seperti Tabloid Jaka Lodang.

³⁹ Lull, James (1998) *Media, komunikasi, Kebudayaan. Suatu Pendekatan Global*, Yayasan Obor, Indonesia. Hal 4

⁴⁰ McQuill, Denis (1987) *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta. Hal 83

Ideologi merupakan konsep yang abstrak dimana pemahaman akan ideologi terkadang berbeda antara orang yang satu dengan yang lainnya. Raymond Williams mengemukakan tiga hal mengenai ideologi, yaitu :

1. *A system of beliefs characteristic of a particular class or group*
2. *A system of illusory beliefs false ideas or false consciousness which can be contrasted with true or scientific knowledge*
3. *The general process of the production of meaning and ideas*⁴¹
 1. (Suatu sistem keyakinan yang menandai karakteristik dari kelas atau kelompok tertentu.
 2. Suatu sistem keyakinan ilusif (gagasan palsu) atau kesadaran palsu yang bisa dikontraskan dengan pengetahuan sejati atau pengetahuan ilmiah.
 3. Proses umum produksi makna dan gagasan.)

Menurut William, ideologi digunakan untuk menunjuk kepada sebuah sikap yang diatur dalam pola yang masuk akal. Artinya ketika sikap menjadi sesuatu yang penting dalam sebuah kelompok atau kelas, maka hal itu menjadi aturan main dalam memahami orang lain. Jika hal itu tidak ditaati maka akan ada hukuman yang akan diberikan kepada individu yang melanggarnya. Dengan kata lain sikap tersebut mempunyai tempat tinggal dalam ideologi (*attitudes have homes in ideologies*).⁴²

Media massa memegang peranan penting dalam menjaga nilai-nilai kelompok dan mengontrol bagaimana nilai-nilai kelompok tersebut dijalankan. Untuk mengintegrasikan masyarakat dalam tata nilai yang sama, pandangan atau nilai harus didefinisikan sehingga keberadaannya diterima dan diyakini kebenarannya.

⁴¹ Fiske, John. op.cit. Hal 165

⁴² Fiske, John. Ibid, Hal 166

Media massa juga melakukan framing pada setiap peristiwa yang akan ditampilkan sehingga peristiwa tersebut menjadi bermakna dan relevan dengan khalayak. Sebuah peristiwa menurut Stuart Hall⁴³ hanya akan berarti jika ditempatkan dalam identifikasi kultural dimana berita tersebut hadir. Ketika melakukan framing, media melakukan proses seleksi peristiwa (yang dianggap penting) dan memberi makna dengan membuat rekonstruksi realitas. Berarti media menempatkan peristiwa ke dalam peta makna atau sering disebut *maps meaning*. *Maps meaning* juga tergantung pada bagaimana *share* yang dilakukan media terhadap nilai budaya atau liberal akan berpengaruh pada *share* antara media dengan nilai dan norma budaya di lingkungannya.

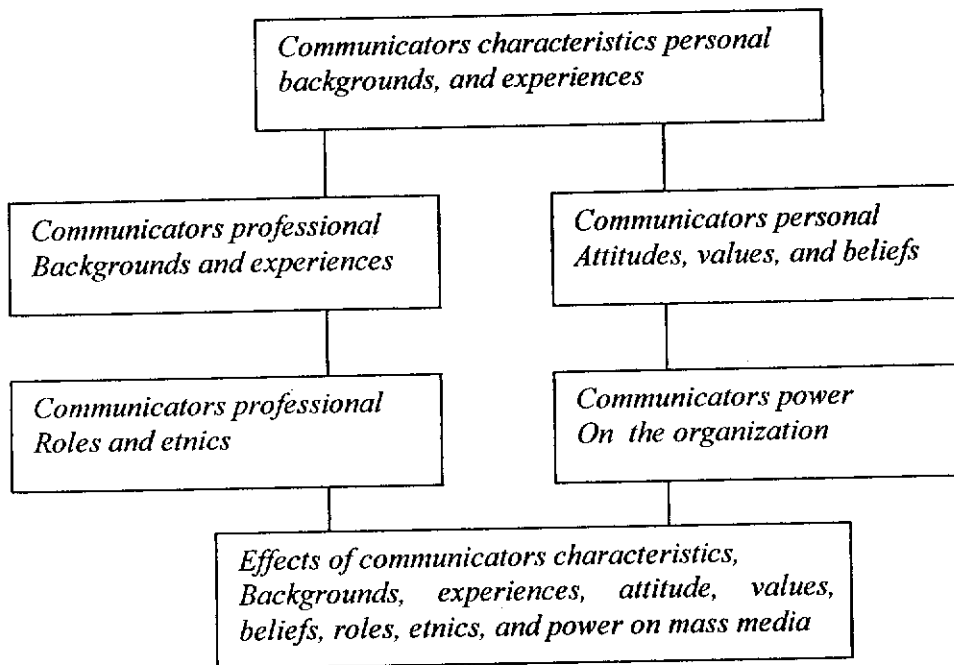
Ketika framing dilakukan dalam suatu media, akan sangat dipengaruhi oleh faktor dari dalam maupun dari luar media tersebut yang pada akhirnya mempengaruhi bagaimana isi media yang dihasilkan. Faktor dari dalam media dipengaruhi oleh karakter pekerja media, kegiatan rutin media, sistem organisasi media, ideologi media. Sedangkan faktor dari luar media dipengaruhi oleh sumber dan kontrol pemerintah.

a. Pengaruh Isi Media dari Faktor Internal Media

Pekerja media menghasilkan out put media yang akan terlihat pada isi pemberitaan yang diturunkan. Masing-masing pekerja media memiliki kepribadian, profesionalisme, dan menganut nilai-nilai yang berbeda satu dengan lainnya. hal ini tentu berpengaruh terhadap isi media yang mereka hasilkan. Seperti yang ditunjukkan dalam skema berikut ini:

⁴³ Eriyanto, *Ibid*, hal 120

Skema 1. Faktor Internal Media yang Mempengaruhi Isi Media



Sumber : Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Rees, *Mediating The Message*, Second Edition, USA : Longman Publisher, 1996, hal. 65

Pekerja media dengan latar belakang yang dimilikinya mempunyai tendensi-tendensi tertentu yang akan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap realitas yang sebenarnya. *"Our families, our school, and all of our life experiences shape our priorities, expectations, an dreams"*.⁴⁴ Ketika seorang pekerja media adalah seorang nasionalis, maka ia akan menulis dan menghasilkan tulisan dengan menggunakan atribut nasionalis. Tulisan dalam media massa juga menggambarkan seperti apa penulisnya walaupun tidak mutlak karena ada perimbangan dari profesionalisme kerja mereka sebagai jurnalis. Shomaker dan Ress (1996) menyebut kepercayaan dan nilai individu sebagai *"motherhood"* dan

⁴⁴ Pamela J. Shoemaker dan Stephen D Rees, *Mediating The Message*, Second Edition, USA Longman Publisher, 1996, hal. 78

Gans (1979) mendefinisikan "motherhood" dengan " *Identities these as ethnocentrisme, altruistic democracy, responsible capitalism, small town pastoralism, individualism, moderatism, social order, and nasional leadership*".⁴⁵

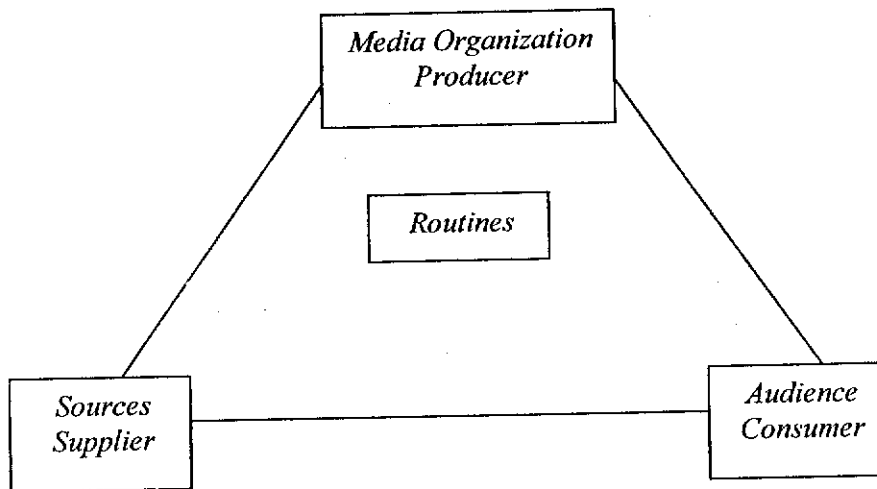
Etnosentrime disini bisa berarti bahwa pekerja media akan menganggap budaya yang dimiliki penting untuk ditampilkan dalam tulisan mereka bila pribadi mereka juga menganggap penting. Faktor agama yang dianut oleh pekerja media juga memainkan peran yang sangat mempengaruhi. Pekerja media akan menampilkan agamanya bila kemungkinan untuk melakukannya ada.

Institusi media mempunyai aktivitas rutin yang dilakukan sehari-hari. Aktifitas media melibatkan bahan mentah berita yang dikumpulkan oleh para reporter, pembuat tulisan/ wartawan, dan khalayak media. Bahan mentah/ *raw material* media perlu diolah kemudian disajikan kepada pembaca/ khalayak. Bahan mentah media merupakan sumber berita, pengolahan *raw material* dilakukan oleh produser, dan khalayak sebagai konsumen media. Keputusan dari pengambilan bahan mentah yang akan dijadikan berita, siapa yang akan mengolahnya menjadi tulisan-tulisan/ berita, dan khalayak mana dan seperti apa yang dijadikan sasaran, akan mempengaruhi hasil *out put* yang dihasilkan oleh media bersangkutan.

⁴⁵ Shoemaker dan Rees, *Ibid.*, hal. 82

Skema 2. Hubungan Rutin Media

Process of Production of Symbolic Content →



Sumber : Pamela J. Shoemaker dan Steaphen D. Rees, *Mediating The Message*, Second Edition, USA: Longman Publisher, 1996., hal. 109

Pada saat pekerja media masuk kedalam institusi media maka mereka menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan yang ada dalam institusi tersebut. Menjadi bagian dari institusi atau perusahaan, mengharuskan pekerja media untuk tunduk, patuh, dan mengikuti aturan yang ada. Setiap organisasi termasuk institusi media memiliki sistem keorganisasian yang harus dijalani oleh setiap anggotanya. Sistem keorganisasian dalam suatu institusi dipengaruhi oleh kepentingan dari pemilik yang dimanifestasikan dalam bentuk kebijakan organisasi.

Kebijakan ini akan memberi 'panduan' kepada pekerja media dalam melakukan pekerjaannya. *"Ultimately media owners or their appointed top executive have the final say in what the organization does. If the employees don't like it, they can quit. Others will be found to take their place, and routines can*

always be changed".⁴⁶ Pemilik perusahaan memiliki otoritas bahkan bisa melakukan sesuatu yang merubah kegiatan rutin media. Bila pekerja media tidak suka atas kebijakan yang dibuat pemilik, maka taruhannya adalah keluar karena kebijakan tersebut sulit untuk diubah.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem organisasi media sangat dipengaruhi oleh pemilik perusahaan, pemilik memiliki kekuatan yang sangat besar untuk dipatuhi oleh pekerja media yang berada dalam intitusi atau perusahaan media tempat mereka bekerja.

Daniel Hallin membuat gambaran atau ilustrasi menarik untuk menjelaskan bagaimana berita ditempatkan dalam peta ideologi. *Pertama*, bidang penyimpangan (*sphere of deviance*), *Kedua*, bidang kontroversi (*sphere of legitimate conroversi*) dan *Ketiga*, adalah bidang konsensus (*sphere of consensus*).⁴⁷

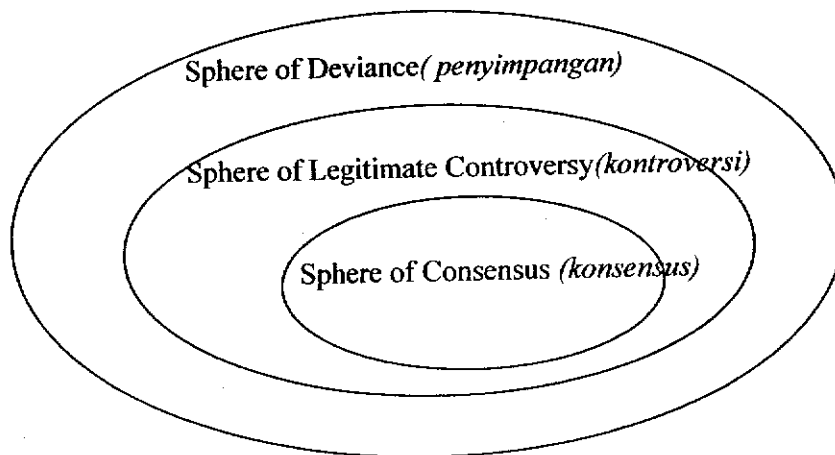
Ideologi juga dapat dilihat dalam teks dengan melihat penandaan realitas yang dilakukan media, dari sisi mana media menempatkan/ memposisikan dirinya serta penilaian apa yang mereka berikan. Dari ketiga bidang ideologi tersebut di atas, dapat menjelaskan bagaimana peristiwa-peristiwa dipahami dan ditempatkan oleh wartawan dalam keseluruhan peta ideologi pembaca. Apakah penyimpangan, konsensus (berarti media setuju dengan realitas), atau kontroversi (media tidak setuju/ kontra terhadap realitas yang ada) seperti pada skema berikut :

Skema 3. Bidang/ Peta Ideologi Media

⁴⁶ Soemaker dan Rees, *Ibid.*, hal. 163

⁴⁷ Soemaker dan Rees, *Ibid.*, Hal 227

Skema 3. Bidang/ Peta Ideologi Media



Sumber : D. Hallin, *The Uncensored War* (Berkeley: University of California Press, 1986), p.117

Bidang-bidang ini menjelaskan bagaimana peristiwa-peristiwa dipahami dan ditempatkan oleh wartawan dalam keseluruhan peta ideologis. Dalam wilayah penyimpangan, suatu peristiwa, gagasan, atau perilaku tertentu dikucilkan dan dipandang menyimpang. Ini seperti nilai yang dipahami bersama bagaimana peristiwa secara umum dipahami secara sama antara berbagai komunitas. Bidang kedua adalah wilayah kontroversi, kalau pada wilayah penyimpangan suatu peristiwa, gagasan atau perilaku dipandang menyimpang dan buruk pada wilayah ini realitas masih diperdebatkan atau dipandang kontroversial. Sedangkan wilayah paling dalam menunjukkan bagaimana realitas tertentu dipahami dan disepakati secara bersama-sama sebagai realitas yang sesuai dengan nilai-nilai ideologi kelompok tertentu.

b. Pengaruh Isi Media dari Faktor Luar Media

Faktor *pertama* dari luar media yang mempengaruhi isi media yaitu sumber yang digunakan media. Selain reporter media yang mencari berita langsung dari sumber berita yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian yang diliput, media massa juga memperoleh/ mengambil sumber berita dari kantor-kantor berita dunia.

Kevalidan dan subjektifitas informasi yang diperoleh dengan langsung menemui sumber berita yang terkait lebih terjaga karena belum banyak pihak yang terlibat selain orang atau institusi yang terkait. Informasi yang diperoleh dari kantor berita dunia, akan tercampuri dengan subjektifitas yang dibangun oleh mereka sehingga informasi tadi berdasarkan perpektif mereka. Pemilihan kantor berita juga akan mempengaruhi seperti apa informasi tersebut dikemas. Setiap kantor berita mewakili suatu negara yang tentunya akan membawa cara pandang negara tersebut dalam *package informasi/ pesan* mereka.

Faktor luar media yang *kedua* adalah kontrol pemerintah. Pemerintah yang memimpin negara mempunyai otoritas dan kemampuan untuk mengatur segala kehidupan bernegara termasuk kebutuhan penduduknya akan informasi dari media. Media ada dalam suatu institusi yang lebih besar yaitu negara, oleh karena itu media harus mengikuti peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Sebelum reformasi pers Indonesia tidak bebas menyuarakan aspirasinya. Namun setelah reformasi pers kita bebas menyuarakan aspirasinya dan ini membawa pengaruh pada perkembangan media dan pembelajaran media pers di negara kita.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian konstruktif dengan metode analisis framing. Paradigma konstruksionis memandang bahwa tidak ada realitas yang objektif, semua realitas subjektif tergantung dari sudut pandang dan konstruksi tertentu. Fakta/ realitas pada dasarnya dikonstruksi. Kata-kata terkenal Carey, "*realitas bukanlah sesuatu yang terberi, seakan-akan ada, realitas sebaliknya diproduksi*".⁴⁸ Pendekatan konstruksionis mempunyai empat sifat, yaitu :⁴⁹

1. Secara ontologis bersifat relatif dengan memahami realitas merupakan hasil konstruksi sosial. Kebenaran suatu realitas bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial.
2. Secara epistemologi bersifat transaksional/ subjektif maksudnya pemahaman tentang sesuatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi antara peneliti dengan yang diteliti
3. Secara metodologis bersifat reflektif dialektik. Pendekatan konstruksionis menekankan empati dan interaksi dialektik anatara peneliti dan responden untuk merekonstruksi realitas yang diteliti melalui sebuah metode kualitatif, peneliti terlibat langsung dan berinteraksi dengan objek yang diteliti.
4. Secara axiologis pendekatan ini memandang nilai, etika, dan pilihan moral merupakan bagian tak terpisahkan dalam suatu penelitian. Peneliti sebagai *passionate participant*. Fasilitator yang menjembatani keragaman subjektifitas pelaku sosial (Guba dan Lincon: 1994)

Metode ini tentu berusaha untuk mengerti dan menafsirkan makna dari suatu teks dengan jalan menguraikan bagaimana media membingkai berita. Salah satu untuk melihat konstruksi media yaitu dengan menggunakan analisis framing. Pendapat dan pandangan media akan terlihat dari opini atau berita yang ditampilkan kepada para pembaca atau khalayak. Konstruksi atau framing yang

⁴⁸ Carey dalam Eriyanto (2004), Ibid., hal 20

⁴⁹ Guba dan Lincon (1994), *Competing Paradigm in Qualitative Reaserch*, London: SAGE Publication, disadur dari buku *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Agus Salim (Penyunting)

dilakukan media online dalam pemberitaan yang mereka turunkan merupakan pemilihan hal-hal yang menjadi titik tekan perhatian (isu), masukan, dan kritik media terhadap Pidato tahunan Presiden tahun 2006.

Analisis yang bisa dilakukan untuk mengungkapkan konstruksi media atas pemberitaan yang mereka turunkan, oleh Kompas Cyber Media dan Media Indonesia Online, adalah analisis framing. Analisis framing yaitu analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana realitas dibentuk dan dikonstruksi oleh media.

Analisis framing pada penelitian ini menggunakan model William A. Gamson dan Andre Modigliani yang memahami wacana media sebagai satu gugusan perspektif interpretasi (*interactive package*) saat mengkonstruksi dan memberi makna suatu isu. Perangkat framing yang dikemukakan oleh Gamson dan Modigliani dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Perangkat Framing Model Gamson dan Modigliani

Frame Central organizing idea for making sense of relevant events, suggesting what is at issues	
Framing Devices (Perangkat framing)	Reasoning Devices (Perangkat penalaran)
Methapors Perumpamaan atau pengandaian	Roots Analisis kausal atau sebab akibat
Catchphrases Frase yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana. Ini umumnya berupa jargon atau slogan.	Appeals to principle Premis dasar, klaim-klaim moral
Exemplaer	Consequences

<p>Mengaitkan bingkai dengan contoh, uraian bisa teori, perbandingan) yang memperjelas bingkai</p>	<p>Efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai.</p>
<p>Depiction Penggambaran atau pelukisan suatu isu yang bersifat konotatif. Depiction ini umumnya berupa kosakata, leksikon untuk melabeli sesuatu. Visual Image Gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. Bisa berupa foto, kartun, ataupun grafik untuk menekankan dan mendukung pesan yang ingin disampaikan.</p>	

Sumber : William dan Modigliani dalam Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, LKiS, Yogyakarta., hal 225

Berdasarkan keterangan diatas dapat dijelaskan elemen-elemen yang dimaksudkan dalam perangkat framing model William dan Modigliani sebagai berikut :⁵⁰

1. *Core frame* (gagasan sentral) pada dasarnya berisi elemen-elemen inti untuk memberikan pengertian yang relevan terhadap peristiwa, dan mengarahkan makna isu yang dibangun oleh *condensing symbol* (simbol yang “dimampatkan”).
2. *Condensing Symbol* adalah hasil pencermatan terhadap interaksi perangkat simbolik (framing devices dan reasoning devices) sebagai dasar digunakannya perseptif. Simbol dalam wacana akan terlihat transparan bila didalamnya menyusup perangkat yang bermakna yang mampu berperan sebagai panduan menggantikan sesuatu yang lain.
3. Struktur *framing devices* mencakup *methaphors*, *exemplars*, *catchphrases*, *depictions*, dan *visual image* yang menekankan aspek bagaimana “melihat” suatu isu. Struktur *reasoning devices*

⁵⁰ Alex Sobur, *Teks Media: Suatu Pengantar Analisis wacana, Analisis Semiotik dan Analisis framing*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung., hal 178-180

- menekankan aspek pembenaran terhadap cara “melihat” isu, yakni *roots* (analisis kausal) dan *appeals to principle* (klaim moral).
4. Secara literal, *metaphors* dipahami sebagai cara memindah makna dengan merelasikan dua fakta melalui analogi, atau memakai kiasan dengan menggunakan kata-kata seperti, ibarat, bak, sebagai, umpama, laksana.
 5. *Exemplars* dipahami sebagai cara mengemas fakta tertentu secara mendalam agar satu sisi mendapat bobot makna lebih untuk dijadikan rujukan/ pelajaran. Posisinya menjadi pelengkap bingkai inti dalam kesatuan berita untuk membenarkan perspektif.
 6. *Cathphrase* yaitu istilah, bentukan kata, atau frase khas cerminan fakta yang merujuk pemikiran atau semangat tertentu. Dalam teks berita, *cathphrase* terwujud dalam bentuk jargon, slogan, atau semboyan.
 7. *Depictions* dimaknai sebagai cara menggambarkan fakta dengan memakai kata, istilah, kalimat konotatif agar khalayak terarah ke citra tertentu. Asumsinya pemakai kata khusus diniatkan untuk membangkitkan prasangka, menyesatkan pikiran dan tindakan, serta efektif sebagai bentuk aksi politik. *Depictions* dapat berbentuk stigmatisasi, eufemisme, serta akronimisasi.
 8. *Visual Image*, pemakaian foto, diagram, grafis, tabel, kartun, dan sejenisnya untuk mengekspresikan kesan, misalnya perhatian dan penolakan, dibesar-kecilkan, ditebal-tipiskan, serta pemakaian warna. Visual image bersifat natural dan sangat mewakili realitas yang membuat erat muatan ideologi pesan dengan khalayak. *Roots* (analisis kausal), pembenaran isu dengan menghubungkan suatu objek atau terjadinya hal lain. tujuannya membenarkan penyimpulan fakta berdasarkan hubungan sebab akibat yang digambarkan atau dibeberkan.
 9. *Appeal to principle*, pemikiran, prinsip, klaim moral sebagai argumen tasi pembenaran membangun berita, berupa pepatah, cerita rakyat, mitos, doktrin, ajaran, dan sejenisnya. *Appeal to principle* yang *appriori*. Dogmatis, simplistik dan monokausal (nonlogis) bertujuan membuat khalayak tak berdaya menyanggah argumentasi. Fokusnya, memanipulasi emosi agar mengarah ke sifat, waktu, tempat, cara tertentu, serta membuatnya tertutup/ keras dari bentuk penalaran.

2. Obyek Penelitian

Objek penelitian ini adalah dua media online nasional, yakni Kompas Cyber Media (KCM) milik Surat Kabar Kompas dan Media Indonesia online (MI Online) milik Surat Kabar Media Indonesia online yang menurunkan pemberitaan mengenai Pidato Tahunan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Sidang

Tahunan (ST) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tahun 2006. Penelitian ini hanya mengambil 5 pemberitaan terkait Pidato Tahunan Presiden yakni, dua hari menjelang pidato tanggal 16 Agustus 2006 yaitu tanggal 14 Agustus hingga dua hari setelah tanggal 23 Agustus 2006 yaitu tanggal 25 Agustus 2006.

Alasan lain yang mendasari penelitian ini menggunakan kedua media tersebut karena kedua media tersebut bersekala nasional dan Internasional misalnya, Media Indonesia menurut hasil riset yang dilakukan oleh Ac-Nielsen pada tahun 2004, pembaca Media Indonesia adalah khalayak kelas menengah atas yang suka menggunakan uang dalam jumlah banyak dengan segmentasi pembaca yang didominasi oleh kalangan *white collar* (atas) sebesar 42% dan kemudian disusul oleh kalangan *blue collar* (menengah atas) dan student (*mahasiswa dan pelajar*) masing-masing 22 % dan 16 %.⁵¹ Asumsinya bahwa Media Indonesia dikonsumsi oleh khalayak umum yang berpendidikan sehingga pemberitaan yang diturunkan tentu menggunakan bahasa jurnalis yang diperuntukan untuk kalangan menengah atas, berpendidikan yang memegang kendli kebijaksanaan baik diperusahaan, institusi pemerintah, institusi pendidikan dan lain sebagainya.

Selain itu pemilik media online Kompas Cyber Media dan Media Indonesia Online tentu menjadi objek penelitian yang menarik. Seperti telah diterangkan dalam kerangka teori tentang ideologi media. Pemilik media merupakan salah satu faktor internal media yang dapat mempengaruhi isi pemberitaan media. Surya Paloh, seorang pengusaha asal Aceh, kader partai

⁵¹ Riset yang dilakukan oleh Ac-Nielsen tahun 2004 dalam *Company profile* Media Indonesia.

Golkar, sekaligus seorang nasionalis sebagai pemilik Media Indonesia diketahui memiliki hubungan dekat dengan Presiden Yudhoyono tentu sangat mempengaruhi pemberitaan mengenai pidato tahunan Presiden Yudhoyono dalam Sidang Tahunan DPR/MPR tahun 2006.

Sedangkan Kompas yang selalu diidentikkan dengan Jacob Oetama yang notabene adalah seorang Jawa-Katolik-Tionghoa, tentu mempengaruhi pemberitaan Kompas terhadap pidato tahunan Presiden Yudhoyono. Dengan 550.000 eksemplar perhari menunjukkan bahwa Kompas menjadi koran dengan oplah terbesar di Indonesia.⁵² Asumsinya dengan tingkat pembaca sebanyak itu Kompas Cyber Media diakses oleh banyak khalayak mulai dari kelompok intelektual, politikus, ekonom serta dari kelas menengah bawah hingga kelas menengah atas.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Dalam pengumpulan data teknik yang digunakan adalah studi pustaka yaitu, mengolah data yang diperoleh dari literatur, buku, jurnal, website, surat kabar dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan topik penulisan.

b. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada dan catatan yang dimiliki oleh unit analisis, sehingga dapat dimanfaatkan guna memperoleh data serta melengkapi data. Untuk itu peneliti mempelajari

⁵² Kelompok Kompas Gramedia. *Sejarah dan Perkembangannya saat Ini*, <http://www.kompas.co.id/infokarir/sejarah.cfm>, 10 September 2006-12:23 WIB

dokumen-dokumen dan catatan-catatan di Komaps Cyber Media dan Media Indonesia Online. Pada bulan Agustus tahun 2006.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan analisis framing model William dan Modigliani yang merupakan salah satu model paling populer dalam penelitian teks media. Alasan lainnya karena model ini dianggap lebih lengkap dari berbagai analisis model framing yang ada.

Analisis framing model William dan Modigliani termasuk dalam paradigma konstruksionis, yang bersifat kualitatif. Menurut William Gamson, wacana media adalah elemen yang penting untuk memahami dan mengerti pendapat umum yang berkembang atas suatu isu atau peristiwa. Data-data tersebut tidak hanya berdasarkan pendapat umum saja namun dihubungkan dan diperbandingkan juga dengan bagaimana media mengemas dan menyajikan berita. William dan Modigliani mendasarkan pendekatan framingnya berdasarkan pendekatan konstruksionis yang melihat representasi media dalam berita dan artikel, terdiri atas *package* interpretatif yang mengandung konstruksi makna tertentu. Di dalam *package* ini terdapat dua struktur, yaitu *core frame* dan *condensing symbols*. Struktur pertama merupakan pusat organisasi elemen-elemen ide yang membantu komunikator untuk menunjukkan substansi isu yang tengah dibicarakan. Sedangkan struktur yang kedua mengandung dua substruktur, yaitu *framing devices* dan *reasoning device*.

Perangkat tersebut berupa kata, kalimat, pemakaian gambar atau grafik tertentu, proposisi, dan sebagainya. Salah satu perangkat penalaran William Gamson dan Modigliani adalah efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai. Model ini sesuai dengan penelitian yang hendak dilakukan yaitu untuk mengetahui untuk mengetahui bagaimana media online, Kompas Media Cyber dan Media Indonesia Online membingkai (Framing) pemberitaan tentang Pidato tahunan Presiden tahun 2006, untuk mengetahui bagaimana perbedaan Media Online Kompas Media Cyber dan Media Indonesia online dalam membingkai (Framing) pemberitaan tentang Pidato tahunan Presiden tahun 2006 serta untuk mengetahui sejauh mana ideologi media mempengaruhi kebijakan redaksi media online Kompas Cyber dan Media Indonesia online, dalam membingkai isi teks pemberitaan tentang Pidato tahunan Presiden tahun 2006.

Dari pendekatan ini akan terlihat bagaimana Kompas Cyber Media dan Indonesia Media online sebagai komunikator menyusun atau mengkonstruksi pemberitaan mengenai Pidato tahunan Presiden dalam Sidang Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah tahun 2006. Serta bagaimana pesan yang disampaikan akan berkembang, dan terus mengalami perubahan makna.

5. Sistematika Penulisan

Pada skripsi ini , peneliti akan membagi kedalam empat bab, dimana bab I akan menjelaskan bagaimana Kompas Cyber Media dan Media Indonesia Online memberitakan Pidato Tahunan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam

Sidang Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPR/MPR Senayan Jakarta pada tanggal 16 dan 23 Agustus tahun 2006. Adanya isu interupsi yang akan dilancarkan oleh Anggota DPR terutama dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sangat mempengaruhi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain penting dari sisi politik dan ekonomi, pidato tahunan Presiden yang dihadiri juga oleh tamu undangan negara dipandang penting dari sisi pencitraan yang dibangun oleh Presiden dan Kabinetnya. Interupsi yang terjadi ketika pidato sedang dibacakan tentu menjadi *preseden* buruk bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sosok Megawati sebagai Pimpinan Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memiliki mayoritas suara di DPR dan Sebagai partai yang terang-terangan menjadi oposisi Pemerintah diakui memegang peranan penting bagi upaya Pemerintah untuk merangkul komponen bangsa yang lain guna menerima program-program yang di ajukan oleh Pemerintah melalui Pidato tahunan Presiden tahun 2007 mendatang. Begitu pentingnya keadaan ini maka banyak media massa di Indonesia baik cetak maupun elektronik yang mengangkat masalah atau topik ini dalam pemberitaannya. Hal inilah yang menjadi latar belakang dan rumusan masalah dalam skripsi in.

Analisis framing model William dan Modigliani adalah perangkat teori yang diperlukan oleh peneliti untuk membedah pemberitaan di Kompas Cyber Media dan Media Indonesia Online. Dengan menggunakan teori framing ini akan diketahui bagaimana media membangun sebuah konstruksi peristiwa yang kemudian berkembang menjadi wacana ditengah masyarakat.

Pada Bab II peneliti akan menuliskan profil media yang menjadi obyek penelitian yaitu Kompas Cyber Media (KCM) dan Media Indonesia online (MI Online) mulai dari sejarah hingga perkembangannya saat ini.

Pada Bab III peneliti akan menuliskan analisis data yang bahannya diperoleh dari kedua media online Kompas Cyber Media dan Media Indonesia Online yang berupa berita-berita terkait Pidato Tahunan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Sidang Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada tanggal 16 hingga 23 Agustus 2006 di Gedung DPR/MPR Senayan Jakarta. Kemudian pada Bab IV skripsi ini akan diakhiri dengan rangkuman kesimpulan dan saran.